



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERLINDUNGAN ANAK: AKSELERASI TARGET PENURUNAN *STUNTING* 14% DI 2024

Mohammad Teja

Peneliti Ahli Muda

teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Masalah *stunting* di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang perlu perhatian khusus. Anak Indonesia yang terjebak *stunting* harusnya bisa diselamatkan pada 1000 hari pertama kelahiran. Masih tingginya prevalensi anak *stunting* di Indonesia menunjukkan kurangnya pemenuhan nutrisi yang layak didapat oleh anak. *Stunting* merupakan ancaman yang serius dan dibutuhkan penanganan yang khusus guna menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, apalagi di masa sekarang ini dampak pandemi yang memengaruhi perekonomian masyarakat Indonesia yang masih harus ditangani. *Stunting* di Indonesia dikarenakan sebagian kelahiran bayi di Indonesia sudah dalam kondisi kekurangan nutrisi dan dibesarkan dengan kekurangan zat gizi, hal lain yang menjadi penyebab *stunting* adalah keterbatasan dan ketersediaan sanitasi dan air bersih.

Di tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting* lebih rendah daripada tahun lalu 35 triliun menjadi 25 triliun. Meskipun begitu, penurunan alokasi anggaran ini tidak akan mempengaruhi target tahunan yang rencananya akan dicapai oleh BKKBN sebagai pelaksana dan penanganan permasalahan *stunting*. Diketahui target tahunan penurunan angka *stunting* 3 persen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang menetapkan prevalensi *stunting* dari 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2024.

Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, bahwa prevalensi *stunting* saat ini berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Pada tahun-tahun sebelumnya angka *stunting* secara konsisten turun. Untuk mencapai target 14 persen pemerintah harus menargetkan tiap tahunnya 3-3,5 persen penurunan angka *stunting* hingga 2024. Untuk mencapai target tersebut tiap tahunnya, BKKBN hanya mengelola anggaran sebesar 2,6 triliun yang menjadi bagian dari dana pendampingan *stunting* di lapangan seperti untuk dana alokasi khusus (DAK) dan operasional keluarga berencana (BOKB). Sisa banyak anggaran lainnya di kelola oleh Kementerian/Lembaga teknis yang dipercaya mendukung upaya pencapaian target penurunan *stunting*. Dijelaskan, anggaran 25 triliun tersebut disalurkan antara lain melalui bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bantuan nontunai, pangan dan lainnya.

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan mendapat anggaran penanganan *stunting* sebesar Rp3,1 triliun yang berarti sekitar 14 persen dari anggaran keseluruhan (25 triliun). Untuk mencapai target 14 persen pada 2024, dengan segala tantangan di lapangan tidak dipungkiri pemerintah membutuhkan sinergitas dan keterlibatan serius semua pihak untuk mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14 persen untuk menyelamatkan anak dan masa depannya.

Atensi DPR

Pencapaian target prevalensi *stunting* 14 persen di tahun 2024 perlu mendapat perhatian DPR RI, khususnya Komisi VIII yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengawal agar pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia, dengan anggaran yang tersebar di beberapa kementerian/Lembaga, Komisi VIII ikut berperan aktif dalam pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran yang berkenaan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini adalah mendorong pencapaian target penurunan 14 persen angka *stunting* di Indonesia. Komisi VIII sebagai komisi yang membidangi secara khusus tentang Perlindungan Anak dapat membuat Panitia Kerja Pengawasan terkait dengan pelaksanaan rencana target penurunan *stunting*. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas penurunan *stunting* Pimpinan DPR RI khususnya bidang KORKESRA perlu membentuk Tim Pengawasan untuk mendampingi pencapaian target tersebut mengingat anggaran yang besar dan penggunaannya berada pada kementerian/lembaga yang berbeda.

Sumber

beritasatu.com, 27 Maret 2022;
Kompas, 25 Maret 2022;
Media Indonesia, 28 Maret 2022;
nasional.kompas.com, 20 Januari 2022;
Republika, 25 Maret 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Dewi Wuryandani
Izzaty

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022